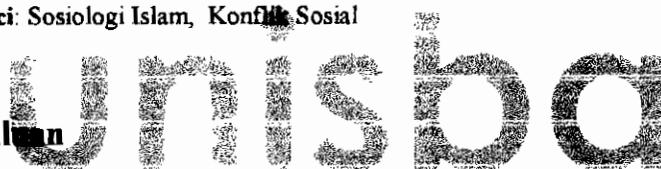


KONSEP SOSIOLOGI ISLAM TENTANG KONFLIK SOSIAL

¹Mahmud Thohier¹Fakultas Dakwah Unisba Bandung Jl. Ranggagading no.8 Bandung
e-mail: mahmudthohier@gmail.com

Abstrak. Sifat kebhinnekaan yang dimiliki bangsa Indonesia ternyata juga menyimpan potensi maupun faktor disharmoni. Pandangan umum yang telah lama dipopulerkan adalah bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang ramah-tamah, serta akomodatif terhadap berbagai nilai budaya asing dan berintegrasi di tengah-tengah masyarakat. Jika dikaji lebih mendalam, tentu dapat dikatakan bahwa potensi konflik dan budaya kekerasan yang muncul terlihat relative sama kuatnya dengan budaya keramah-tamahan bangsa ini. Di sisi lain, fenomena tersebut tentunya bisa juga dikatakan berbanding terbalik dengan sikap religius yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Asumsi yang berlaku mestinya, sikap religius dapat mencegah timbulnya konflik yang semestinya tidak perlu. Atau jika konflik berkembang pada skala kecil tentunya religiusitas ini bisa menjadi penyejuk dan unsur pendamai pertikaian antar kelompok tersebut. Namun yang terjadi di lapangan tidaklah demikian. Banyak konflik yang terjadi justru dibangun dengan mengatasnamakan agama. Ada beberapa etika yang harus dipegangi demi terwujudnya integritas sosial. Pertama, tidak boleh merasa benar sendiri, karena kebenaran mutlak adalah milik Allah dan kebenaran manusia bersifat relatif. Kedua, perlu ditegakkan sikap-sikap toleransi (tasamuh), saling menghormati, tidak menghinai pihak lain. Ketiga, pertimbangkan sikap berbaik sangka (husnul al-dzan), bersikap positif, yaitu menilai pihak lain yang berbeda secara proporsional, dan Keempat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dengan kekuasaan.

Kata kunci: Sosiologi Islam, Konflik Sosial



1. Pendahuluan

Konflik merupakan keadaan dimana masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus menerus diantara unsur-unsurnya, dan melihat bahwa setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial serta menilai keteraturan dalam masyarakat itu hanyalah di sebabkan karena adanya tekanan atau paksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa. Konsep sentral dari teori ini adalah wewenang dan posisi. Intitesisnya bahwa distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata tanpa kecuali menjadi factor yang menentukan konflik sosial secara sistematis. Kekuasaan dan wewenang yang senantiasa menempatkan individu pada posisi atas dan posisi bawah dalam setiap struktur, karena wewenang itu adalah sah, maka setiap individu yang tidak tunduk terhadap wewenang yang ada akan terkena sanksi. Dengan demikian masyarakat disebut oleh Ralf Dahrendorf sebagai: persekutuan yang terkoordinasi secara paksa (imperatively coordinate dassociations [G. Ritzer, 2009:26])

Teori konflik Karl Marx. Karl Marx mendasarkan pada pemilikan sarana-sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat. Marx mengajukan konsepsi mendasar tentang masyarakat kelas dan perjuangannya. Marx tidak mendefinisikan kelas secara panjang lebar tetapi ia menunjukkan bahwa dalam masyarakat, pada abad ke-19 di Eropa di mana dia hidup, terdiri dari kelas pemilik modal (Borjuis) dan kelas pekerja miskin sebagai kelas Proletar. Kedua kelas ini berada dalam